

KOLOM SI KLERK**BEBAN BARU MASYARAKAT**

Belum lagi pulih dengan badai krisis ekonomi yang melanda Indonesia, masyarakat kini diberi tambahan beban baru melalui kenaikan beberapa harga kebutuhan mereka. Pada penghujung tahun 2002 pemerintah menaikkan tarif angkutan bus ekonomi dan elpiji telah lebih dulu naik. Selanjutnya pada awal tahun 2003 ini kenaikan tarif telepon, listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Tentu saja beberapa kenaikan ini disambut oleh masyarakat dengan berbagai kekecewaan dan protes keras.

Pemerintah bukannya tidak tanggap terhadap protes tersebut, namun setidaknya menurut perhitungan mereka dan karena sudah disetujui DPR bahwa subsidi perlu dikurangi untuk kemandirian anggaran. Hal ini dilakukan dalam rangka kelanjutan pembangunan, dan apabila subsidi tetap dilakukan maka pembangunan tidak bisa berlanjut alias mandek. Pilihan sulit ini terpaksa diambil oleh pemerintah, walaupun harus mendapatkan kecaman masyarakat.

Era keterbukaan (transparency) dan akuntabilitas (accountability), yang pada saat ini selalu tampil mengemuka pada setiap kesempatan pidato pemerintah dan seminar-seminar, ternyata juga tidak dimanfaatkan oleh pemerintah dengan baik. Tidak ada sosialisasi yang dilakukan sebelumnya, sehingga masyarakat sangat merasa terkejut. Apalagi ketika masyarakat masih mengingat pada pidato partai politik yang sekarang sedang manggung, bahwa mereka akan berfihak pada rakyat kecil, buktinya?. Akibatnya terjadi penentangan di mana-mana.

A Tony Prasetyantono (Kompas 14/2/2003), menyebutkan bahwa penentangan terhadap kebijakan ini dilakukan oleh kubu populis atau kelompok yang membela rakyat banyak. Sementara itu ada kelompok seberangnya yakni neo liberalis, yakni yang berfaham dan meyakini serta menyerahkan semua urusan perekonomian kepada pasar liberal, yang bisa bekerja secara sempurna.

Dengan berbagai kenaikan tersebut, kemudian apa yang terjadi dengan daya beli masyarakat?. Kompas (03/01/2003) menyatakan pemerintah perlu mendukungnya dengan kenaikan gaji pegawai negeri sipil, polisi, militer, setidaknya menekan berbagai pungutan liar, korupsi, yang jelas-jelas akan menambah beban masyarakat.

Kebijakan penghapusan subsidi yang tidak populer ini memang telah diambil. Kompas menyebutnya bahwa pemerintah lebih memilih kebijakan yang tidak populis tetapi konstruktif, daripada memilih kebijakan yang populis tetapi fatalis. Namun pertanyaan berikutnya adalah soal pengalihan berbagai subsidi itu menjadi subsidi langsung kepada masyarakat miskin dalam bentuk beras murah, kesehatan, ataupun pendidikan. Seberapa jauh subsidi ini benar-benar dirasakan oleh rakyat banyak?

(Dayat Hidayat).